



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI BANTEN**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

JAKARTA,

RABU, 10 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Banten

PEMOHON

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Demokrat (Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Nasdem (Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Rabu, 10 Juli 2019, Pukul 14.01 - 15.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Aswanto
- 2) Saldi Isra
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Hasri Puspita Ainun
Muchtar Hadi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ace Kurnia

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Natalia Sahetapy
2. Ewi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ridwan Syaidi Tarigan
2. Heriyanto Citra Buana
3. Mu'jizatullah

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Raden Elang Yayan Mulyana
2. Trio Alberto
3. Nashrulloh

E. Termohon:

1. Nurkhayat Santosa
2. Bayu Anggoro

F. Kuasa Hukum Termohon:

1. Hendri Sita Ambar K
2. Bagia Nugraha
3. Sutikno
4. Taufik Hidayat

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Maulana Bungaran
2. Alex Candra
3. Sahroni

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Fadli Nasution
2. Fahrozi
3. Zulfikri Lubis

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ahmad Suherman
2. Irwan

J. Pihak Terkait Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Iip Miftahul Choiry

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Nurul Amalia
2. Hikmat Prihadi
3. Irfan Rifa'i
4. M. Hadrawi Ilham
5. Bagus Setiawan
6. Pilipus Tarigan
7. Harli Muin

L. Bawaslu:

1. Fritz Edward Siregar
2. Didih M. Sudi
3. Nuryati Solapari
4. Sam'ani
5. Adelline Syahda

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.01 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Pertama-tama sebelum kita mulai sidang, kami mohon maaf harus tertunda 30 menit karena ada Rapat Permusyawaratan Hakim yang kami harus hadiri, sehingga semua ... bukan hanya Panel, kita yang mundur 30 menit, tapi semua Panel, tiga-tiga Panel, ketiganya Panel mundur, gitu, ya.

Baik. Sekali lagi, mohon maaf untuk ... kalau itu membuat Ibu, Bapak tidak nyaman, kami mohon maaf.

Sidang dalam Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Perkara Nomor 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional, Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat, Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasional demo ... ini ... anu tadi, ya ... Nasdem, ya? Ini Nasdem, tolong di ... yang Partai Nasional Demokrat itu diganti Nasdem. Kemudian, Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selanjutnya, dipersilakan untuk Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 memperkenalkan, siapa yang hadir pada sidang ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Pemohon dalam Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dalam hal ini PDI Perjuangan, diwakili oleh saya Ace Kurnia. Ya, terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Untuk Perkara Nomor 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional, belum hadir, ya? Baik.

Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, salam sejahtera. Saya dari Partai Demokrat. Nama saya Natalia Sahetapy. Bersama saya, Kuasa tambahan Ewi ... Advokat Ewi, di bawah kuasanya juga, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Surat Kuasa tambahannya juga sudah masuk?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ini ada, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Sudah diserahkan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Belum, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Belum? Tolong, Petugas, diambil dulu!

Baik. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 27 ... eh, sori, Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dulu, Nasdem.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, assalamualaikum wr. wb. Kami dari DPP Partai Nasdem. Hadir di sini saya sendiri, Ridwan Syaidi Tarigan. Di sebelah kiri saya ada Heriyanto Citra Buana. Di belakang ada Mu'jizatullah, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADEN ELANG YAYAN MULYANA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Untuk yang hadir dalam perkara ini, perkenalkan nama saya, Raden Elang Yayan Mulyana dan rekan saya, Alberto. Kebetulan dalam Surat Kuasa, 3 orang, tapi yang hadir 2 orang. Untuk itu cukup, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, kesempatan diberikan kepada Pihak Termohon KPU. Silakan, perkenalkan siapa yang hadir pada sidang hari ini!

16. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA AMBAR K

Baiklah. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Baiklah, kami selaku Kuasa Hukum dari Pihak Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diwakili oleh beberapa kantor hukum. Dan kami sendiri di sini selaku Kuasa Hukum untuk Permohonan dengan Nomor Register 128-12-16 dan seterusnya, yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional.

Telah hadir bersama kami di sini Komisioner dari KPU Banten, Bapak Nurkhayat Santosa dan Bayu Anggoro. Dan kami sendiri, selaku Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Ali Nurdin dan Patners. Telah hadir, Hendri Sita Ambar K dan Bagia Nugraha.

Selain itu, juga ada hadir dari Kantor Hukum Hicon untuk Kuasa Hukum Termohon dalam Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)

dan Nomor Register 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Untuk rekan-rekan kantor hukum lainnya, kami persilakan untuk memperkenalkan diri.

17. KETUA: ASWANTO

Jangan Anda yang mempersilakan. Anda tidak punya kewenangan untuk mempersilakan.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA AMBAR K

Oh, ya. Oh, maaf. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Mungkin terlalu bersemangat, ya.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA AMBAR K

Maaf, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, untuk Kuasa Pihak Termohon dari kantor lain. Sudah dipersilakan tadi sama Ibu.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTIKNO

Terima kasih, Yang Mulia. Ternyata kami jadwalnya pukul 16.00 WIB untuk Perkara Hanura. Mohon maaf, ini ada panggilannya, ada kesalahan di Panitera. Jadi, kami mohon maaf, pamit. Nanti ketemu lagi Panel 2, pukul 16.00 untuk Hanura.

23. KETUA: ASWANTO

Oh, baik. Silakan. Bapak masih ada kesempatan untuk ngopi, berarti.

Dari kantor lain? Masih ada?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Ada satu, Yang Mulia, izin.

25. KETUA: ASWANTO

Silakan.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Kami dari Kantor Hukum Nurhadi Sigit Law Office. Dalam perkara ini, kami mewakili Termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum RI untuk Nomor Perkara 54-14-16/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrat. Dan yang kedua, untuk par ... Nomor Perkara 192-05-16/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 dari Nasdem. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ASWANTO

Baik. Masih ada dari kantor hukum lain yang menjadi kuasa di Termohon? Sudah, ya?

Baik. Selanjutnya, kesempatan kami persilakan, Bawaslu!

28. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Yang Mulia.

Hari ini kami didampingi oleh Pak Didih M. Sudi, Ketua Bawaslu Banten. Sebelah kiri saya, Ibu Nuryati Solapari, Anggota Bawaslu. Kemudian, Pak Sam'ani, Anggota Bawaslu Banten, dibantu oleh Adelline Syahda sebagai staf pendukung, dan saya Fritz Siregar, Anggota Bawaslu. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Selanjutnya, Pihak Terkait! Ini Pihak Terkait sudah memasukkan surat Permohonan sebagai Pihak Terkait? Semua? Ada yang belum memasukkan surat Permohonan sebagai Pihak Terkait? Sesuai dengan PMK kita, untuk menjadi Pihak Terkait harus lebih awal menyampaikan Permohonan. Sudah semua, ya? Kalau ... kalau belum, harus jujur, ya.

Baik. Yang pertama, kita mulai dari ujung kiri, ya? Eh, ujung kanan, sudah pegang mik.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAULANA BUNGERAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Partai Gerindra, selaku Kuasa Hukum untuk terkait ... selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 yang

diajukan oleh PDIP Perjuangan ... PDI Perjuangan. Saya, Maulana Bungaran. Sebelah kanan saya, Alex Candra, dan di belakang ada Sahroni. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya!

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ASWANTO

Sudah mengajukan Permohonan juga, Pak, ya?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Sudah, Yang Mulia.

35. KETUA: ASWANTO

Baik.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Melalui mekanisme partai (...)

37. KETUA: ASWANTO

Ya.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Yang mengajukan. Assalamualaikum wr. wb. Kami juga mendapat Kuasa dari Partai Demokrat yang ditandatangani oleh Pak SBY dan Pak Hinca. Dalam hal ini, Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019-nya adalah perkara internal Partai Demokrat. Kami hadir hari ini, Yang Mulia, dengan Kuasa Khusus, Kuasa Tambahan. Saya sendiri, Fadli Nasution. Kemudian di sebelah kiri saya,

Fahrozi. Dan di belakang, ada Zulfikri Lubis. Ini kami bawa Surat Kuasa tambahannya, Yang Mulia.

39. KETUA: ASWANTO

Baik. Tolong, Petugas, diambil!

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Dari Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: ASWANTO

Walaikumsalam wr. wb. Selanjutnya, Pihak Terkait! Saudara siapa yang bicara sekarang? Saudara juga sudah memasukkan Permohonan sebagai Pihak Terkait?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Sudah, Yang Mulia.

43. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan!

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, kami dari Tim Kuasa Hukum Partai Golkar, DPP Partai Golkar. Dalam hal ini, Pihak Terkait Perkara Nomor 128-12-16/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional. Akan tetapi, informasi yang kami dapat ... perkenalkan saya sendiri, Ahmad Suherman.

45. KETUA: ASWANTO

Ya.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Rekan saya Irwan, S.H. Kami berdua dari Partai Golkar. Informasi yang kami dapatkan pada saat kami memasukkan keterangan Pihak Terkait di bawah bahwa Perkara Nomor 128-12-16/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 ini telah dicabut oleh Pemohon. Akan tetapi, sampai saat ini kami belum mendapatkan akta pencabutan tersebut. Demikian, Yang Mulia.

47. KETUA: ASWANTO

Baik. Nanti kita bicarakan soal pencabutan itu.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Siap.

49. KETUA: ASWANTO

Oh. Ini PAN, ya? Ya, kami sudah mendapat surat yang bertanggal 4 Juli yang ditandatangani oleh Ketua PAN, Zulkifli Hasan, ditandatangani dan Eddy Soeparno juga ditandatangani sebagai Sekretaris Jenderal. Untuk Perkara Nomor 128-12-16/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 ini DPRD ... Dapil DPRD Kabupaten Serang II Provinsi Banten juga ditarik oleh ... memang ditarik oleh PAN, ya. Ya, Saudara ... pekerjaan Saudara jadi ... jadi hilang, begitu, ya. Tapi kan, yang penting sudah tanda tangan. Gitu, ya?

Baik. Masih ada yang jadi Pihak Terkait? Silakan!

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Izin, Yang Mulia. Karena kira-kira untuk aktanya, kapan kita bisa terima, Yang Mulia?

51. KETUA: ASWANTO

Nanti berhubungan dengan ... dengan Kepaniteraan ... oh, kalau ininya ... kalau suratnya, bisa ... bisa diminta di Kepaniteraan, ya.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Siap. Bawah, Yang Mulia.

53. KETUA: ASWANTO

Baik.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Izin, Yang Mulia. Kami kalau begitu permisi, Yang Mulia, untuk meninggalkan tempat.

55. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan! Anda juga punya kesempatan untuk ngopi.

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

57. KETUA: ASWANTO

Selanjutnya, Pihak Terkait! Maju, di depan saja, Mbak, kosong itu.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami Pihak Terkait dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Pihak Terkait Nomor Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Nasdem. Saya Nurul Amalia, bersama 2 rekan saya Hikmat Prihadi, dan Irfan Rifa'i.

Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: ASWANTO

Walaikumsalam wr. wb. Masih ada yang menjadi Pihak Terkait? Masih ada 2, ya? 2 atau 3 lagi? ?? Silakan!

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: ASWANTO

Ini juga surat Permohonannya sudah masuk, ya?

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Sudah, Pak.

63. KETUA: ASWANTO

Ya.

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Kami dari Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Saya sendiri M. Hadrawi Ilham bersama dengan rekan saya Pak Bagus Setiawan, dan Caleg Prinsipal Iip Khairul ... Miftahul ... Choiry. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

65. KETUA: ASWANTO

Ya. Pihak Terkait untuk perkara? Untuk perkara (...)

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Untuk Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

67. KETUA: ASWANTO

Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Yang diajukan oleh Nasdem Dapil III Banten.

69. KETUA: ASWANTO

Oke.

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Dapil I Banten.

71. KETUA: ASWANTO

Baik.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: ASWANTO

Selanjutnya, yang masih jadi Pihak Terkait?

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PILIPUS TARIGAN

Ya. Kami, Yang Mulia. Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai PDI Perjuangan. Yang hadir, kami selaku Kuasa Hukum, Pilipus Tarigan dan Harli Muin, dan 1 staf dari DPD Banten.

75. KETUA: ASWANTO

Baik.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PILIPUS TARIGAN

Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Perlu kami informasikan lebih awal. Bahwa untuk Pemohon dulu, Permohonan yang akan disampaikan adalah Permohonan yang sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan, yaitu paling lambat tanggal 31 Mei.

Jadi, kalau ada Permohonan selain itu, itu disimpan saja dulu. Yang dipresentasikan itu yang paling lambat 31 Mei. Kalau tidak melakukan perbaikan, berarti yang tanggal 24, ya? 24 ... 24 Mei.

Kemudian, kepada Para Pemohon, perkara Saudara kami sudah lakukan gelar perkara. Sehingga, Panel sudah membaca secara tuntas perkara Saudara. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, Saudara diminta menyampaikan pokok-pokoknya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama, 10 sampai 15 menit.

Kalau ada yang ... apa namanya ... nanti ada yang lebih singkat, ya, enggak ada masalah, bisa dioper waktunya ke yang lain, gitu.

Kita mulai dari perkara (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Mohon izin, Yang Mulia.

79. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar, sebentar!

Baik. Untuk ... apa tadi? Demokrat?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Ada 1 caleg perorangan atas nama Sanudin sudah masukkan di sini Permohonan sendiri. Apakah ikut dibacakan juga untuk hari ini?

81. KETUA: ASWANTO

Ya. Ini kan di undang-undang sudah jelas. Bahwa yang bisa mengajukan sengketa hasil itu adalah peserta pemilu.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ya.

83. KETUA: ASWANTO

Peserta pemilu itu adalah partai politik. Tetapi kemudian, memang dimungkinkan perseorangan mengajukan, tetapi harus ada rekomendasi dari partai pengurus DPP. Dan kemudian, tidak dimajukan secara

perseorangan, tetapi digabung. Itu sudah jelas regulasinya, ya, baik di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun di PMK kita, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Terima kasih, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pada awalnya, yang Anda persoalkan itu kan maju perseorangan, ya? Setelah itu digabung ke partai, dimasukkan di perbaikan yang tanggal 5 Juli, ya?

Nah, berarti yang itu sudah hangus itu, ya. Jadi, yang sampai batas 31 Mei saja.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Terima kasih, Yang Mulia.

87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Silakan!

88. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih.

Untuk yang pertama, Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PDIP. Saudara punya waktu 10 sampai 15 menit untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Saudara. Langsung ke pokok perkara saja. Silakan, siapa yang menyampaikan?

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Mohon izin untuk merenvoi dan melengkapi halaman 6. Halaman 6 paling atas itu yang setrip terakhir itu tertulis kel ... Kelurahan Serua Indah. Harusnya dia Sawah, Yang Mulia, sesuai dengan uraian di Posita di halaman berikutnya halaman 7, huruf F.

90. KETUA: ASWANTO

Oke.

91. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kelurahan apa?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Kelurahan Sawah.

93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Serua Indah itu?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya. Karena itu sesuai dengan Posita di uraian berikutnya di huruf F.

95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang betulnya Sawah (...)

96. KUASA HUKUM PEMOHON NO 74-03-16: ACE KURNIA

Sawah.

97. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sawah Indah, ya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON NO 74-03-16: ACE KURNIA

Sawah. Serua Indah jadi Sawah, gitu. Ya karena di ... apa ... di dalam Posita di halaman 7 itu huruf F itu Sawah terakhir itu.

99. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang di atasnya juga ada Serua?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Serua beda, Yang Mulia. Serua dan Serua Indah kelurahan yang berbeda.

101. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Berbeda, ya?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Berbeda.

103. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, yang di atas tetap Serua, ya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Serua. Serua Indah itu sudah kami perbaiki, makanya itu menjadi Sawah.

105. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Sesuai dengan perbaikan tertanggal 30 Mei.
Kemudian, yang kedua karena perihal Permohonan ini adalah permohonan pembatalan, kami lengkapi Petitum kami dengan membatalkan keputusan KPU nomor sekian dan selanjutnya.

107. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu di halaman berapa itu?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Di halaman 10, Yang Mulia, di Petitum. Jadi, itu jadi angka 3.

109. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang tabel ini?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, jadi angka 3 sebelum (...)

111. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah ada di sini, kan?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya.

113. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak ada diubah lagi itu?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Tidak ada. Cuma perihal Permohonannya itu dimasukkan ke dalam Petitem ... ke Petitem permohonan pembatalannya karena dalam perihal Posita sudah ada.

115. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, langsung ke pokoknya saja. Persandingan perolehan suara Pemohon calon anggota DPRD partai ... menurut Termohon dan Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan. Bahwa menurut Termohon, kami hanya akan sebutkan 2 partai saja, antara partai (...)

117. KETUA: ASWANTO

Tangerang Selatan itu Dapil I, ya?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, Dapil I Tangerang Selatan, Yang Mulia.

119. KETUA: ASWANTO

Oke.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Kami hanya akan sebutkan perolehan sua ... 2 suara partai saja karena yang lain tidak berubah.

Untuk Partai Gerindra, menurut Termohon adalah 18.064 suara dan untuk Pemohon, dalam hal ini PDI Perjuangan adalah 18.004 suara.

Bahwa perolehan suara partai dan caleg sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sah dikarenakan telah terjadi kekeliruan penghitungan berupa pengurangan, dan penambahan, atau penggelembungan, terutama di Kelurahan Cipayung, Kelurahan Ciputat, Kelurahan Jombang, Kelurahan Sawah Baru, Kelurahan Serua, dan Kelurahan Sawah, sebagaimana terurai dalam Posita angka 6, eh ... halaman 6, 7, 8, dan 9, dan dikuatkan oleh bukti-bukti yang telah kami sampaikan melalui Kepaniteraan.

Sehingga oleh karenanya berdasarkan seluruh uraian dan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah ... Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan telah terbukti terjadi penambahan suara penggelembungan yang tidak sah pada perolehan suara Partai Gerindra dengan perincian ... dianggap dimohon dibacakan, huruf a, b, c, d, dan f.

Yang ketiga. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPD ... DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil I.

Menetapkan perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil I yang benar adalah ... kami hanya menyebutkan 2 perolehan 2 partai saja, Partai Gerindra dan kami sebagai Pemohon. Untuk Partai Gerindra, memperoleh suara akhir 17.970, untuk PDI Perjuangan atau Pemohon=18.042 suara.

121. KETUA: ASWANTO

Yang Saudara bacakan yang mana itu? Yang tanggal 23 Mei?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Yang tanggal 30.

123. KETUA: ASWANTO

Tanggal 30.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Yang terakhir, yang tanggal 30.

125. KETUA: ASWANTO

Oke.

126. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu di Petitumnya 1, 2-nya, oke.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, yang ketiga tadi sebagaimana dalam ... kami undang dalam Posita itu kita perihalnya adalah permohonan pembatalan, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, tapi kan sebelumnya tidak ada, ya?

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Tidak ada.

130. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ini kan berarti ditambahkan baru, ya?

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, dilengkapi saja.

132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, berarti itu bukan ... bukan renvoi namanya.

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Dilengkapi.

134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu menambah jantungnya itu namanya, ya, oke?

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik, Yang Mulia.

136. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Terima kasih. Sa ... kami lanjutkan, izin, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Memerintahkan KPU RI c.q. dalam hal ini KPU Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan amar putusan ini. Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum. Ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

140. KETUA: ASWANTO

Ini untuk ... apa ... ini tadi untuk Tangerang Selatan Dapil I, ya?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik, Yang Mulia. Betul.

142. KETUA: ASWANTO

Berapa dapil yang Saudara persoalkan di dalam Permohonan ini?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

1 dapil saja.

144. KETUA: ASWANTO

Satu dapil saja?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Satu dapil saja, Yang Mulia.

146. KETUA: ASWANTO

Oke, berarti untuk Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah selesai?

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Cukup.

148. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk perkara nomor ... ini PAN (Partai Amanat) ini informasinya dicabut, ya? Cabut. Ya, perkara 1 ... eh, tadi sudah disampaikan Nomor 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Sudah disampaikan tadi, ya, itu dicabut Perkara Nomor 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya. Tadi sudah disampaikan.

Giliran berikutnya, Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Demokrat, silakan! Pokok-pokonya saja.

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan langsung dari Permohonan kami langsung ke halaman 9, Yang Mulia. Izin juga memperkenalkan diri, hadir bersama kami Caleg DPR RI Nomor 1, Ibu Vivi Sumantri Jayabaya, Beliau hadir bersama dengan kami. Terima kasih, Yang Mulia. Izin renvoi dulu, Yang Mulia.

150. KETUA: ASWANTO

Ya.

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Di halaman 10, kalau diizinkan (...)

152. KETUA: ASWANTO

Biasanya ... biasanya lawyer-nya kalau Prinsipalnya datang agak galak. Tapi ini enggak galak ini. Silakan!

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ya.

154. KETUA: ASWANTO

Yang mana direnvoi?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Izin ... izin halaman 10, Yang Mulia, 4.19 ... 4.19.

156. KETUA: ASWANTO

Ini Permohonan yang tanggal? Sebentar, Permohonan tanggal berapa?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Perbaikan Permohonan yang tanggal 31 Mei.

158. KETUA: ASWANTO

31 Mei, ya? Oke. Silakan!

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ya. 4 ... 4.19 di sini kami tulis TPS ada 137 TPS, tapi sebenarnya 126 TPS, Yang Mulia.

160. KETUA: ASWANTO

Oke.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Kemudian, di halaman 18 di Kesimpulan. Kami menuliskan selisih suara sebanyak 3.200, tapi yang lain kami tulis=3.000. Jadi, mohon disamakan 3.000 saja, Yang Mulia. Terima kasih.

162. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan!

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Baik, Yang Mulia. Kami langsung fakta dan alasan Permohonan di halaman 9.

Bahwa setelah rekap hasil ... bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 6 Mei 2019 tersebut di atas, Saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan dan dituangkan dalam Form Model DB-2.KPU. Kami tuangkan dalam Bukti P-3.

Kemudian, di halaman 10. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat provinsi, Saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan dan

dituangkan pernyataan keberatan dalam mod ... Form Model DC-2.KPU, ada di Bukti P-5.

Bahwa Pemohon telah melayangkan laporan pengaduan ke Bawaslu Provinsi Banten yang diterima tanggal 16 Mei 2019, bisa dilihat di P-6.

Bahwa laporan Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Banten tidak ditanggapi, maka Pemohon melayangkan laporan pengaduan kepada Bawaslu RI yang diterima tanggal 23 Mei 2019 pada Bukti P-7.

Yang tadi saya renvoi. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan, penyandingan, sinkron ... sinkronisasi data C-1, dengan DAA-1, dan DA-1 di 20 kecamatan ... 26 kecamatan, 68 kelurahan, 126 TPS, terdapat selisih suara sebanyak 3.000 suara. Sehingga, patut diduga kuat terjadi manipulasi data berupa penggelembungan suara yang berakibat pada hasil perolehan suara. Kami masukkan dalam Bukti P-8 sampai Bukti 271.

Adapun pokok Permohonan, kami anggap dibacakan. Kami akan masuk di halaman 14 mengenai jenis-jenis pelanggaran yang masif.

Bahwa tindakan pelanggaran secara sistematis, dan struktural a quo berimplikasi secara ekstensif, dan masif terhadap proses dan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan dugaan penggelembungan suara dan dengan ditemukannya 3.000 selisih suara antara C-1 dan DAA-1. Yang lainnya kami anggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, semestinya Pemohon Vivi Sumantri Jayabaya, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Banten I Nomor Urut 1, ditetapkan sebagai Calon Anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum, dan keadilan, dan untuk memulihkan hak dan ketidakadilan, serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemohon pada khususnya, yang dilibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kiranya Berita Acara Termohon Nomor 135 dan 101/BA.06.KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum, sehingga karenanya berdasar dan ... dan berasal hukum untuk mendiskualifikasi Calon Anggota Legislatif DPR RI Nomor Urut 2 dengan Dapil Banten.

Kami ke halaman 18, Kesimpulan. Yang lainnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia, kami masuk Kesimpulan. Bahwa dari seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan umum legislatif, khususnya DPR RI di 26 kecamatan, 68 kelurahan, dan 126 TPS, terdapat selisih suara sebanyak 3.000 suara, yang tadi sudah saya renvoi. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan ma ... dan masif. Karenanya memo ... Pemohon meminta

kepada Mahkamah Konstitusi, memerintahkan pembatalan Berita Acara KPU Nomor 135 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Bahwa penyelenggaraan rekapitulasi penghitungan suara Termohon telah bertindak manipulasi data C-1 Plano dan C-1 nomor urut. Sehingga pemilihan umum, khususnya di daerah Pandeglang berjalan secara tidak fair dan terjadi kecurangan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada provinsi Bawaslu RI. Akan tetapi, Bawaslu tidak menindakizin (...)

164. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tadi Anda ... apa namanya ... nomor berapa, bagian mana yang?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Halaman 18 ... halaman 18.

166. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Silakan!

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ya. 463 sekarang, Yang Mulia. Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, akan tetapi Bawaslu tidak menindaklanjuti hasil laporan yang laporan mana yang nyata-nyata telah melakukan pembiaran sehingga pelaksanaan pemilu diselenggarakan tidak sungguh-sungguh berdasarkan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, raha ... rahasia, jujur, dan adil oleh Termohon, sehingga terbukti memenuhi unsur-unsur yang pendiskualifikasian karena bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga adalah patut didiskualifikasi.

Halaman 19, saya masuk petium.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraian di atas, dengan ini perkanankan kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Ha ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohononan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor 135 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
 3. Mendiskualifikasi Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat daerah pemilihan Banten I Nomor Urut 2 sebagai Calon DPR RI daerah pemilihan Banten I.
 4. Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat daerah pemilihan Banten I Lebak, Pandeglang, pada pemilihan umum setidaknya sebagai berikut. Izin, Yang Mulia, saya hanya membacakan perolehan Ibu Vivi Saja. Ibu Vivi Sumantri Jayabaya=56.446.
 5. Menetapkan Calon Anggota DPR RTi ... RI Partai Demokrat daerah pemilihan Banten I, Nomor Urut 1 atas nama Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos., MSi., sebagai calon anggota DPR RI terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019. Dan apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, Ex Aequo et Bono.
- Terima kasih, Yang Mulia.

168. KETUA: ASWANTO

Baik, ada beberapa hal yang perlu klarifikasi. Di halaman depan permohonan Saudara, yang diberi kuasa itu ada 17, ya? 17 orang yang diberi kuasa di halaman 2, itu ya. Yang membacakan tadi siapa? Natalia Sahetapy?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Natalia Sahetapy, Yang Mulia.

170. KETUA: ASWANTO

Nah, di bagian belakang (...)

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Tidak tanda tangan.

172. KETUA: ASWANTO

Yang tanda tangan itu cuma Muhajir dengan Dormauli Silalahi. Ini gimana ini?

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Untuk permohonan ya, Yang Mulia.

174. KETUA: ASWANTO

Ya. Tadi mestinya tanda tangan dulu baru bisa bacakan. Tapi sudah terlanjur gitu, ya. Surat kuasanya ada?

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Surat kuasa asli kami ada di Dapil Aceh. Kami mas ... hanya ...

176. KETUA: ASWANTO

Ada kopinya di sini?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Izin, Yang Mulia. Tidak bawa, Yang Mulia.

178. KETUA: ASWANTO

Ini gimana kita mau tahu bahwa Anda juga diberi kuasa, gitu. Karena Anda belum tanda tangan. Ada 17 nama dan yang menandatangani baru 2, Muhajir sama Dormauli Silalahi, gitu. Nanti tolong di ...

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Boleh, Yang Mulia.

180. KETUA: ASWANTO

Disampaikan kopian surat kuasanya, ya?

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Baik, Yang Mulia.

182. KETUA: ASWANTO

Dan Saudara nanti tanda tangan di (...)

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Di hadapan Panitera.

184. KETUA: ASWANTO

Di ... ya.

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Siap, Yang Mulia.

186. KETUA: ASWANTO

Tanda tangan ini, ya?

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

188. KETUA: ASWANTO

Tadi karena Saudara tidak galak, jadi kita juga tidak galak gitu. Kalau galak, ini mestinya enggak boleh baca karena belum tanda tangan, gitu ya.

Baik, nanti dilengkapi, ya?

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Izin, Yang Mulia. Terima kasih.

190. KETUA: ASWANTO

Baik. Oh, ini surat kuasanya sudah ada. Si ini juga ... ini juga anu, belum tanda tangan semua, ya? Natalia Sahetapy sudah tanda tangan di surat kuasa, ya. Tapi ada beberapa yang belum tanda tangan. Asdar

Toshibo, belum tanda tangan. Rony Eli Hutahaean, tanda ... belum tanda tangan. Klemens Ame, juga belum, ya.

Ya, ada ... dan ini tidak 17 yang di belakang. Anu tidak 17 orang yang terima surat kuasa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Oke, sama ya. Cuma belum ditandatangani semua.

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ya.

192. KETUA: ASWANTO

Tolong nanti dilengkapi, ya?

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Terima kasih, Yang Mulia.

194. KETUA: ASWANTO

Ya.

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Akan saya sampaikan, terima kasih.

196. KETUA: ASWANTO

Baik. Masih ada tambahan, Prof? Silakan!

197. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Kuasa Pemohon, di petitum Anda itu kan ada 2. Petitum Nomor 2 dan Nomor 4, ya, yang urut suara itu. Coba dilihat di halamn 19. Nomor 2 kan membatalkan Berita Acara itu, ya?

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ya, Yang Mulia.

199. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu Nomor 4, menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Kalau sudah dibatalkan untuk apalagi rekap ini diterima? Kira-kira apa penjelasannya ini?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Izin, Yang Mulia. Untuk selanjutnya oleh rekan saya, Ewi, Yang Mulia.

201. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan.
Oke.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Terima kasih.

203. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EWI

Ya, mohon izin Yang Mulia. Ini yang dibatalkan hasil Berita Acara KPU yang tanggal 21.

205. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EWI

Kemudain kita minta Pemohon supaya Majelis menetapkan suara ... perolehan suara berdasarkan petikum yang kami sampaikan.

207. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke ... Oke. Terima kasih.

208. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya?

Baik untuk selanjutnya Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya, Partai Nasdem. Silakan siapa yang menyampaikan?

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Baik. Yang akan menyampaikan, rekan saya yang di belakang untuk Banten I, Yang Mulia.

210. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini, sebentar sebelum ke ... apa ... ke ... ke Permohonan berikutnya. Ini yang Dapil I Cilegon, tadi yang bermasalah, ya? Yang Anda ... yang perorangan, kemudian masuk menumpang di perbaikan itu, ya? Yang tadi kami mengatakan bahwa itu tidak boleh disampikan karena sudah melewati waktu, ya? Ya? Agak tegas! Ini Lawyer kalau lemah-lemah ini, honorinya kecil juga kayaknya. Jangan-jangan belum ada pembayaran di depan, ini.

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Tadi belum sempat makan, Yang Mulia. Izin, terima kasih.

212. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, ini berarti yang melewati tadi, ya? Melewati batas tadi. Oke. Terima kasih.

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Terima kasih, Yang Mulia.

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Baik, mohon izin, Yang Mulia, di belakang. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan saya, Mu'jizatullah menyampaikan Pokok-Pokok Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019, Partai Nasdem Dapil Banten I dan berkedudukan sebagai Pemohon.

Pada kesempatan siang hari ini, Yang Mulia Majelis, yang kami hormati dan kami banggakan. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok materi Permohonan, yang lainnya dianggap dibacakan jikalau memang Yang Mulia Majelis mengizinkan, demi menghematnya waktu. Oh, ya, baik kalau begitu.

215. KETUA: ASWANTO

Panel sudah gelar perkara terhadap perkara Saudara. Jadi, Panel sudah tahu semua isinya sebenarnya. Silakan!

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Baik, Yang Mulia. Langsung ke halaman 8.

217. KETUA: ASWANTO

Ya.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Poin 4.

219. KETUA: ASWANTO

Ya. silakan, Pak!

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Baik. Bahwa perolehan suara Calon Anggota Legislatif atau Caleg Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2 atas nama H. Iip Miftahul Choiry, S.Pdi., diperoleh dengan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM sebagai berikut.

Bahwa diketahui Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2 atas nama H. Iip Miftahul Choiry, S.Pdi adalah putra dari H. A. Bazari Syam, M.Pdi., selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

Bahwa selama masa kampanye Pemilu Legislatif tahun 2019, Caleg PPP Nomor Urut 2 atas nama H. Iip Miftahul Choiry, S.Pdi telah menggunakan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kemeterian

Agama Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak sebagai tim kampanye.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Pandeglang mengadakan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan di tempat CAS Water Park. Pada kegiatan tersebut, hadir Ketua Umum DPP PPP H. M. Romahurmuziy sebagai narasumber dan dihadiri juga oleh Kepala Kanwil Kemeterian Agama Provinsi Banten, H. A. Bazari Syam.

Halaman 9.

221. KETUA: ASWANTO

Ya.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Kemudian, peserta kegiatan tersebut d iantaranya adalah penyuluh PAI non-PNS, Honorer KUA, honorer madrasah negeri, Honorer pada Kemeterian Agama Kabupaten Pandeglang dan pengelola Wajar Dikdas Pondok Pesantren. Selama kegiatan berlangsung, wartawan dilarang masuk ke dalam aula untuk meliput.

Selain itu, terlihat H. Iip Miftahul Choiry, S.Pdi., selaku Caleg DPR RI Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2 ada di tempat kegiatan untuk kepentingan politik dalam rangka pemenangan Caleg DPR RI Dapil Banten I dari Partai Persatuan Pembangunan.

D. Bahwa selain itu, H. Iip Miftahul Choiry melibatkan Aparatur Sipil Negara Kemeterian Agama di wilayah kerja Kabupaten Pandeglang dan Lebak sebagai tim koodinator pemenangannya untuk berkampanye, memobilisasi massa pemilih, memasang, menyebarkan APK, dan menyebarkan uang kepada masyarakat atau pemilih sebagai berikut.

1. Menggerakkan dan menekan guru-guru madrasah, mulai dari MDA, mad ... MI, MTs, dan MA, baik negeri maupun swasta di Wilayah Kerja Kemeterian Agama Pandeglang dan Lebak untuk memilih H. Iip Miftahul Choiry.
2. Menekan guru-guru madrasah MDA, MI, MTs, MA, untuk memanfaatkan orang tua atau wali murid agar memilih H. Iip Miftahul Choiry.
3. Sengaja baru mencairkan dan BSM dua hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2019 sebagai salah satu cara untuk memanfaatkan orang tua atau wali murid agar mau memilih H. Iip Miftahul Choiry.
4. (...)

223. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Mas.

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Ya.

225. KETUA: ASWANTO

Ini kan panjang, ini.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Ya, Yang Mulia.

227. KETUA: ASWANTO

Ya, kami ingin klarifikasi. Kira-kira bukti mana yang bisa meyakinkan kami bahwa apa yang Saudara uraikan itu adalah sesuatu yang benar, gitu. Ada buktinya, enggak?

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Ada, Yang Mulia...

229. KETUA: ASWANTO

Nanti di ... dirujuk ke bukti berapa?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Ya. Itu nanti karena ini secara keseluruhan Partai Nasdem itu sudah dikumpulkan bukti-bukti itu untuk nanti disertakan dalam pembuktian.

231. KETUA: ASWANTO

Jadi, ada bukti bahwa memang ASN itu dimobilisasi atau dimanfaatkan.

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Betul, Yang Mulia.

233. KETUA: ASWANTO

Terutama yang dalam lingkungan.

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Betul.

235. KETUA: ASWANTO

Kanwil agama gitu ya?

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Ya. Betul, Yang Mulia.

237. KETUA: ASWANTO

Baik. Tolong nanti buktinya, ya.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Siap, Yang Mulia.

239. KETUA: ASWANTO

Kalau cuma ngomong kan nanti kita bingung apa ini dasarnya.

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Siap, Yang Mulia.

241. KETUA: ASWANTO

Ya. Silakan!

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Baik. Saya lupa lagi poin yang mana tadi.

243. KETUA: ASWANTO

Poin e.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Oh, ya.

245. KETUA: ASWANTO

Prof. Mahfud. Ini kebanyakan honor, lupa nomornya.

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Terlalu bersemangat. Baik.

247. KETUA: ASWANTO

Poin e. Prof. Mahfud, itu.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Ya. Ya. Bahwa Prof. Mahfud MD mengungkapkan ketua umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, H. M. Romahurmuziy memanfaatkan jaringan Kementerian Agama mulai dari pusat hingga daerah untuk memenangkan Partai Persatuan Pembangunan. Jika dilihat dari berbagai pengamatan, hal ini juga patut diduga terjadi pada Provinsi Banten, khususnya di Pandeglang dan Lebak.

Bahwasanya PPP memanfaatkan jan ... jaringan Kementerian Agama untuk memenangkan caleg DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2, H. Iip Miftahul Choiry. Diringkas saja, Yang Mulia.

249. KETUA: ASWANTO

Ya. Ini apa ini? Bawaslu, ada Bawaslu ada tersinggung apa ini mengenai apa ini Bawaslu?

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Ya. Sebentar, Yang Mulia.

Poin f. Bahwa anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang dimana ketuanya saudara Ade Mulyadi adalah ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak tidak menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dari Perhimpunan Gerakan Kebangsaan atau (PGK) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang atas pelibatan ASN dalam berkampanye yang telah merusak proses dan cita-cita demokrasi, serta pemilu 2019.

G. Bahwa perbuatan melibatkan ASN yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelibatan ASN dalam kegiatan kampanye dilarang dalam Pasal 280 ayat (2) huruf dan ayat (3) juncto Pasal 493 dan Pasal 494. Melihat dugaan berbagai (...)

251. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebentar. Sebelum lanjut, saya mau juga konfirmasi.

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Ya, Majelis.

253. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah benar ini Saudara Ade Mulyadi.

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Ya.

255. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Adalah ASN di Kementerian Agama.

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Ya.

257. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tetapi juga menjadi anggota Bawaslu.

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Ya, baik.

259. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini menurut Anda seperti itu, ya?

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Ya, betul.

261. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti dikonfirmasi dengan Bawaslu itu apakah benar seorang anggota ASN itu menjadi anggota bawas ... Bawaslu, ya.

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Ya.

263. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Silakan!

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Langsung ke-5. Poin 5-nya. Bahwa berdasarkan uraian dalil kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut di atas, Pemohon memohon keadilan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan seadil-adilnya. Demikian pokok perkara yang bisa kami sampaikan, Majelis.

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Itu untuk Banten I, Yang Mulia. Banten III, saya teruskan. Hanya pokok-pokoknya saja karena persandingan dan mohon direnvoi untuk buk ... apa ... bukti itu untuk dihapus karena kami ada kode bukti sudah diganti berdasarkan daftar bukti yang sudah kami serahkan di MK. Jadi, hanya kode buktinya saja, Yang Mulia.

266. KETUA: ASWANTO

Di halaman berapa, Bapak?

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Di halaman 10, 11, itu kan ada yang kelurahan, di bawahnya ada bukti P-31 itu semuanya dihapus yang bukti ... yang keterangan buktinya karena kita mengganti kode bukti.

268. KETUA: ASWANTO

Yang keterangan di bawah itu?

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Ya. Hanya situ saja. Dan C-1 itu seharusnya tertulis Pemohon dan DA-1 itu adalah Termohon.

270. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Saudara mempersoalkan DPR RI Dapil Banten I, kemudian DPR RI Banten III (...)

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Banten III dan Tangsel V.

272. KETUA: ASWANTO

Tangerang Selatan V, ya?

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Ya. Betul, Yang Mulia.

274. KETUA: ASWANTO

Tangerang Selatan V. Silakan!

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Baik, Yang Mulia. Untuk Daerah Pemilihan Banten III, persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon partai politik untuk pengisian DPR RI Daerah Pemilihan Banten III. Perolehan suara Partai PDIP menurut pe ... Termohon=647.633, menurut Pemohon=598.633. Ada selisih penambahan 48.995.

Partai Golkar menurut Termohon=375.725, Pemohon=356.490, selisih ada penambahan 19.235.

PKS menurut Termohon=375.097, menurut Pemohon=340.564. Untuk Nasdem, perolehan suara menurut Termohon adalah 123.128, menurut Pemohon 120.128, ada penambahan 3.000, Yang Mulia.

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai PDIP, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Pemohon sendiri di Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang. Bahwa terjadi perbedaan jumlah perolehan suara masing-masing parpol yang bila dijumlahkan seluruh C-1 di masing-masing kelurahan dengan penjumlahan DA-1 di Kota Tangerang Selatan di Kecamatan Setu, yaitu kelurahan ... atau Desa Muncul ... tabelnya dianggap dibacakan, Yang Mulia, semuanya. Terus, Kelurahan Desa Babakan, Bakti Jaya, (...)

276. KETUA: ASWANTO

Itu sudah Dapil Tangerang Selatan, ya?

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Ini baru Tangerang ... apa ... untuk Kelurahan Tangerang Selatan.

278. KETUA: ASWANTO

Ya (...)

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Eh, apa ... Kecamatan Tangerang ... kabupaten (...)

280. KETUA: ASWANTO

Enggak. Kan Saudara mempersoalkan 3 Dapil? (...)

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Ya. (...)

282. KETUA: ASWANTO

Apa (...)

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Ini masih Banten III, Yang Mulia.

284. KETUA: ASWANTO

Oh. Masih DPR RI?

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Masih DPR RI (...)

286. KETUA: ASWANTO

Ya. Silakan!

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Itu Kademangan ... Keranggan, Setu, Cipayung, Ciputat, Jombang, Sawah Baru, Cireundeuk, Pisangan, Pondok Kranji, Rempoa, Rengas, Bambu Apus, Kedaung, Pondok Benda, Pamulang Barat, Pamulang Timur, Benda Baru, Pokok Cabe Ilir, Pondok Cabe Udik, Jurang Mangun Barat, Jurang Mangun Timur, Pondok Kacang Timur, Pondok Kacang Barat, Perigi Lama, Perigi Baru, Pondok Aren, Pondok Karya,

Pondok Jaya, Pondok Betut, Pondok Pucung, Buaran, Ciater, Cilenggang, Lenggok Gudang Timur, Lengkok Watan, Rawa Buntu, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Lengkok Karya, Pakualam, Jelupang, Paku Jaya, Pakulonan, Pondok Ca ... Jagung Timur. Dan bila dijumlahkan dari yang sudah disebutkan kelurahannya bahwasannya untuk di perolehan Kota Tangerang Selatan untuk DPR RI Banten III.

PDIP perolehan suara menurut Termohon=173.400. Tapi, menurut Pemohon yang sudah diuraikan sebelumnya 129.361. Sehingga, selisih 44.039.

Partai Golkar=77.305. Dan menurut Pemohon=6.129 ... 19. Sehingga, berselisih 16.086.

PKS menurut Termohon=108.336. Dan Pemohon=73.431. Selisih 34.907. Nasdem=24.902. Pemohon=22.637.

Dan untuk di Kabupaten Tangerang, terdapat sebuah perselisihan, yaitu Panongan. Mekar Jaya sudah dianggap dibacakan. Ranya Iyuh, Peusar, Ranca Kelapa, Serdang Kulon, Mekar Bakti, Ciakar, Dandang, Cibogo, Suradita, Mekar Wangi, Sampora, Cisauk, Tipa Raya, Daru, Pasir Barat, Kutruk, Jambe, Ranca Buaya, Cihuni, Cicalengka, Jateke, Cijantra, Karang Tengah, Malang ... Malang Nengah, Pagedangan, Lengkong Kulon, Kadu Sirung, Situ Gadung, Medang, Pisangan Jaya, Mekar Jaya, Pondok Jaya, Kayu Bongkok, Sepatan, Pekayon, Rawa Kidang, Kosambi, Gintung, Curug Kulon, Suka Bakti, Binong, Curug Wetan, Kadu, Kadu Jaya, Cukang Galih, Suka Mulya, Bunar, Cibadak, Talaga, Talaga Sari, Dukuh, Cikupa, Suka Nagara, Bitung Jaya, Pasir Gadung, Suka Damai, Pasir Jaya, Budi Mulya, Bojong, Tiga Raksa, Kadu Agung, Pasir Bolang, Mata ... Mata Gara, Pasir Nangka, Pete, Tegalsari, Pematang, Cisereh, Marga Sari, Cileles, Sodong, Tapos, Bantar Panjang.

Bila disandingkan perolehan suara yang tadi sudah disebutkan di atas. Se-Kabupaten Tangerang, sebagaimana diuraikan. Maka perolehan suara seb ... sebagai berikut.

PDIP menurut Termohon=259.823. Dan menurut Pemohon=254.867. Terdapat selisih penambahan 4.956.

Partai Golkar=195.522. Menurut Pemohon=192.373. Ada penambahan 3.149.

PKS menurut Termohon=146.979. Menurut Pemohon=143.239. Selisih 3.740.

Nasdem=70.735. Menurut Pemohon=70.000. Sehingga, ada penambahan 735.

Demikian, Yang Mulia, untuk Tangsel.

288. KETUA: ASWANTO

Ya. Sekarang Dapil V, ya, Tangerang Selatan. Siapa yang bacakan ini?

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Saya, Yang Mulia.

290. KETUA: ASWANTO

Sebentar, ini yang surat kuasa juga yang tanda tangan baru 2 orang ini. Dr. Atang Irawan mana?

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Lagi di luar, Yang Mulia.

292. KETUA: ASWANTO

Ridwan Suedi?

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Syaidi, Pak.

294. KETUA: ASWANTO

Ridwan Syaidi Tarigan? He eh, cuma itu yang tanda tangan. Yang baca pertama tadi siapa?

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Siap, Yang Mulia.

296. KETUA: ASWANTO

Siapa namanya?

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Mu'jizatullah, Yang Mulia.

298. KETUA: ASWANTO

Ini Saudara belum tanda tangan ini.

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Di Permohonan?

300. KETUA: ASWANTO

Di Permohonan, di Permohonan di halaman depan itu ada 31 Kuasa. Kemudian ada 31 orang di halaman depan, tapi kemudian ada di ... yang menandatangani di belakang hanya 2 orang. Ya, memang kita menyadari bahwa Kuasa itu bisa maju secara perorangan atau sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Tapi mestinya, kalau ada namanya di depan, dia harus bertanda tangan di belakang. Nah, ini 31 di depan yang tanda tangan di belakang cuma 2, gitu. Nanti dilengkapi saja, ya.

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Siap, Yang Mulia.

302. KETUA: ASWANTO

Yang mau bacakan sekarang siapa?

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Heri Yanto Citra.

304. KETUA: ASWANTO

Heri Yanti Citra Buana ada di belakang ... apa namanya ... ada di belakang Permohonan Saudara, tapi belum tanda tangan. Tadi kita sudah perlakukan untuk Partai Demokrat, ya. Tidak adil kita kalau ... Saudara boleh tanda tangan juga nanti, ya. Silakan!

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, kami akan membacakan untuk Daerah Pemilihan Tangerang Selatan V DPRD kota, Yang Mulia. Persandingan perolehan suara, menurut Termohon dan Pemohon partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan V. Nah, di sini kami hanya mencantumkan ... apa ... untuk partai yang memang kami anggap bermasalah untuk perhitungannya, Yang Mulia. Halaman 55, Yang Mulia.

306. KETUA: ASWANTO

Halaman 55, oke. Silakan!

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Baik. Untuk parpol Partai Keadilan Sejahtera, perolehan suara menurut Termohon adalah 23.160, menurut Pemohon=22.704 suara. Jadi ada selisih penambahan atau penggelembungan 456 suara. Itu kemudian Partai Nasdem, menurut Termohon adalah 7.586 dan menurut Pemohon adalah 7.652, artinya berkurang 66 suara, dan ini perebutan kursi terakhir Tangerang V, kursi 11. Kami di urutan 12 saat ini, tapi kalau ini bergeser, dibenarkan hitungannya maka kami akan menempati posisi ke-11 itu, kursi terakhir.

Dapat kami uraikan sebagai berikut. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera, kami ... semuanya teruraikan di sini, kami hanya membacakan sebagian saja, Yang Mulia, sebageian kecil saja. Untuk TPS 28, sebagai contoh Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, ada penambahan sebanyak 53 suara. Hal ini dapat ... terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C-1 DPR RI Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA-1 kabupaten ... DAA-1 DPRD kabupaten/kota versi Termohon. Dan ini telah kami cocokan juga dengan Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk TPS 28 Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren adalah sesuai atau sama dengan Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Tangerang Selatan milik KPU versi online. vide Bukti P-24 Nasdem Kota Tangsel dan P-25 Nasdem Kota Tangsel.

Kemudian terjadi penambahan suara pula untuk Partai Keadilan Sejahtera di TPS 08, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, sebanyak 50 suara. Yang seharusnya adalah 15 suara, kemudian ... kemudian berubah menjadi 65 suara. Bahwa terjadi penambahan 50 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan penghitungan suara dari Model DAA-1 DPRD Kota Tangerang Selatan, yaitu sebesar 50 suara, vide Bukti 30 Nasdem Kota Tangsel ... Kota Tangerang Selatan. Dan ini telah kami cocokan pula dengan Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota

Tangerang Selatan milik KPU versi online, Bukti P-31 Nasdem Kota Tangerang Selatan V. Ini untuk penggelembungan suara.

Kemudian juga ada pengurangan suara di Partai Nasdem, yaitu terjadi ... halaman 95, Yang Mulia. Bahwa pula ... terjadi pula pengurangan suara bagi Partai Nasdem terjadi di TPS 26, Parigi Lama, Pondok Aren sebanyak 9 suara. Terjadi selisih suara, yang seharusnya 28 maka tertulis oleh Termohon di dalam rekap model D-1 adalah 19 suara.

308. KETUA: ASWANTO

Jadi ada 2 modus, ya?

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

2 modus.

310. KETUA: ASWANTO

Modus penambahan dan modus pengurangan.

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Betul.

312. KETUA: ASWANTO

Ya.

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Dan ini terjadi di (...)

314. KETUA: ASWANTO

Penambahan untuk partai lain, pengurangan untuk partai Anda.

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Ya, untuk Partai PKS.

316. KETUA: ASWANTO

Ya.

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Nah kemudian, dari situ bahwa pada ta ... pada tanggal 8 Mei 2019, saksi Pemohon mendapatkan informasi telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi berupa ketidaksesuaian salinan Model DAA-1 DPRD kabupaten/kota dengan salinan C-1 DPRD kabupaten/kota atau TPS, yaitu yang di TPS pada proses rekapitulasi suara di tingkat PPK. Saksi Pemohon memeriksa salinan Model DA-1 DPRD kabupaten/kota dan C-1 DPRD kabupaten/kota, ternyata hasilnya benar terjadi penggelembungan angka yang cukup masif pada suara-suara Partai Keadilan Sejahtera, di sisi lain suara Partai Nasdem justru berkurang, sehingga merugikan Partai Nasdem.

Bahwa selanjutnya saksi Pemohon melakukan pengaduan kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 14 Mei 2019 tentang adanya kecurangan penggelembungan suara pada Partai Keadilan Sejahtera dan pengurangan suara pada Partai Nasdem. Kami melaporkan ada di beberapa TPS, di beberapa kelurahan, ada sem ... 8 kelurahan, Kelurahan Jurang Mangu Timur ada 3 TPS, Kelurahan Pondok Kacang Timur ada 1 TPS, Kelurahan Jurang Mangu Barat ada 3 TPS, Pondok Kacang Barat=10 TPS, Pondok Pucung=22 TPS ... eh, sori, 1 TPS. Kemudian, Kelurahan Parigi Baru=3 TPS, Kelurahan Parigi Lama=4 TPS, dan Kelurahan Pondok Jaya=1 TPS. Dari keseluruhan, penggelembungan suara Partai Keadilan Sejahtera (...)

318. KETUA: ASWANTO

Miknya ditukar!

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Bahwa penggelembungan suara pada Partai Keadilan Sejahtera di semua TPS sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas dalam Posita tersebut, yakni mencapai 456 suara dan pengurangan atau pengembosan suara yang terjadi pada Partai Nasdem di semua TPS yang dipersoalkan mencapai 66 suara. Bukti kami sudah sampaikan, Yang Mulia. Sehingga perhitungan perolehan suara akhir adalah sebagai berikut. Partai Keadilan Sejahtera versi Model DA-1 DPR=23.160 dan dalam versi pembetulan yang kami cocokkan adalah 22.704. Itu kursi pertama mereka dapat. Kemudian, di kursi keduanya=7 ... mohon maaf,

ini ... untuk Partai Nasdem yang tertulis dalam versi DA-1 DPRD adalah 7.586 yang seharusnya adalah 7.500 ... 7.652 (...)

320. KETUA: ASWANTO

Di ... di Permohonan Saudara, versi Model DAA-1 DPRD=7.720 (...)

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Itu PKS, suara yang kursi terakhirnya (...)

322. KETUA: ASWANTO

Ya, PKS. Versi pembetulan perhitungan (...)

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

7.500 (...)

324. KETUA: ASWANTO

7.568.

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

7.568.

326. KETUA: ASWANTO

Ini kursi kedua PKS?

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

PKS.

328. KETUA: ASWANTO

Nah, terus?

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Untuk kursi Partai Nasdem (...)

330. KETUA: ASWANTO

He em.

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Yang seharusnya yang tertulis adalah dalam versi Model DAA-1 DPR adalah 7.586, yang seharusnya adalah 7.652. Sehingga kami tetap (...)

332. KETUA: ASWANTO

7.562 lawan 7.568.

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

7.568.

334. KETUA: ASWANTO

Berarti Anda yang mestinya, ya?

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Kami yang mendapatkan kursi terakhir (...)

336. KETUA: ASWANTO

Nasdem yang mestinya mendapatkan kursi ke ... sepertinya dapat tuh, ya. Oke. Apa lagi yang Saudara mau sampaikan? Langsung ke Petitum saja.

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Nanti Petitumnya sekalian dibacakan (...)

338. KETUA: ASWANTO

Ya. Karena kita sudah paham modusnya. Ada penambahan, ada pengurangan (...)

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Mohon maaf, Yang Mulia. Berdasarkan Posita kami Nomor ... di halaman tadi terkait dengan laporan kami ke Bawaslu, tanggal 31 Mei, itu ada putusan Bawaslu, Yang Mulia.

340. KETUA: ASWANTO

Ya.

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Yang kami bacakan untuk (...)

342. KETUA: ASWANTO

Itu dimasukkan ndak jadi alat bukti?

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Karena ... akan kami masukkan. Karena 31 ini, baru kami (...)

344. KETUA: ASWANTO

31 Mei baru Anda dapat?

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Baru ... baru diputuskan.

346. KETUA: ASWANTO

Oh, diputuskan. Kapan Anda dapat itu surat?

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Kami dapat baru 2 minggu setelah itu.

348. KETUA: ASWANTO

Tanggal berapa itu?

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Sekitar bulan Juni, tanggal 15.

350. KETUA: ASWANTO

Oke. Oke, silakan apa yang mau dibacakan? Ndak usah dibacakan, dimasukkan saja.

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Kami masukkan sebagai bukti tambahan, Yang Mulia.

352. KETUA: ASWANTO

Ya.

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Mekanismenya kami sampaikan di sini atau (...)

354. KETUA: ASWANTO

Di ... di Kepaniteraan saja.

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Di Kepaniteraan.

356. KETUA: ASWANTO

Itu sudah dileges atau belum?

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Sudah.

358. KETUA: ASWANTO

Kalau sudah dileges, diambil saja.

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Sudah ada yang kami sertakan pula daftar bukti tambahannya. Dan ini, Yang Mulia, ada beberapa bukti yang memang kami masukkan dalam daftar bukti, tapi buktinya kemarin karena ada ratusan dan ini (...)

360. KETUA: ASWANTO

Oh, kalau begitu nanti sekalian saja ke bagian Kepaniteraan. Kalau yang satu tadi bisa langsung kita verifikasi.

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Yang satu bisa langsung diambil? Tambahan?

362. KETUA: ASWANTO

Sekalian saja, bersamaan.

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Oh, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

364. KETUA: ASWANTO

Silakan Petitemnya! Siapa yang bacakan?

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan Petitem.

366. KETUA: ASWANTO

Ya.

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Provinsi Banten untuk Banten I mengab ... mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Sepanjang jumlah perolehan suara DPR RI daerah pemilihan Banten I (...)

368. KETUA: ASWANTO

Agak ... agak jauh sedikit. Terlalu menggema ... terlalu dekat. Menggema, kita tidak jelas. Nanti rekamannya jelek.

369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Baik.

Tiga. Membatalkan perolehan suara calon anggota legislatif Caleg Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2 atas nama H. Iip Miftahul Choiry sebesar 4.993 suara karena diper ... diperoleh dari kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilu legislatif tahun 2019.

Empat. Mengurangi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di daerah pemilihan Banten I yang diperoleh calon anggota legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2, atas nama H. Iip Miftahul Choiry sebesar 4.993 suara, sehingga menjadi 110.823 suara, dikurang 4.993 suara = 60.830 suara.

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk permohonan untuk pengisian keanggotaan DPR, dan seterusnya dianggap dibacakan berikut dengan tabelnya. Untuk daerah Banten III, menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon. Untuk daerah pemilihan Banten III, wilayah Kota Tangerang Selatan sebagaimana berikut. Kota tangsel, Partai Demokrat Indonesia=129.361. Partai Golkar=61.219. PKS=73.431. Nasdem=22.637.

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk daerah pemilihan Banten III, wilayah Kabupaten Tangerang sebagai berikut. Kabupaten Tangerang, Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan=254.867. Gol ... Partai Golkar=192.373. PKS=143.239. Nasdem=70.000 ... 70.000.

Menetapkan hasil perolehan suara seluruhnya yang benar untuk peroleh ... Pemohon daerah pemilihan Banten III sebagai berikut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=598.633. Partai Golkar=356.490. PKS=340.564. Nasdem=120.128.

Untuk daerah pemilihan Tangerang Selatan, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera=22.704. Partai Nasdem=7.652.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

370. KETUA: ASWANTO

Baik, ada tambahan, Prof? Ada tambahan?

371. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini petitum yang dibacakan itu yang di halaman berapa? Karena di sini agak lain yang kita lihat di halaman 103, 104, dan 105. Agak berbeda dari yang dibacakan tadi. Coba ditegaskan dulu. Ini yang kita baca ini Permohonan yang tanggal 31 Mei, ya? Apa itu yang dibaca? Kok bisa berbeda? Coba dibaca sekali lagi dulu, berbeda nanti ini. Jadi repot nanti kita. Apalagi ini (...)

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Maaf, Yang Mulia. Yang mana letak bedanya?

373. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Yang kita baca di sini ya, daerah pemilihan Banten III.

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Banten III, Yang Mulia.

375. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, pemilihan Banten III itu di Tangerang Selatan ada Parpol ... Parpol Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu 129.361.

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Ya, Yang Mulia.

377. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, selanjutnya di Parpol Nomor 5, ya, menetapkan hasil perolehan suara benar di Banten III sebagai berikut. PDI Perjuangan=598.633. Benar?

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Ya, Yang Mulia.

379. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terus kemudian di daerah pemilihan Tangerang Selatan V, konfirmasi, ya?

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Ya.

381. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Parpol PKS, perolehan suara 22.704?

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Ya, Yang Mulia.

383. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Partai Nasdem 7 (...)

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

7.652.

385. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

7652. Baik. Jadi hanya mengkonfirmasi saja. Terima kasih.

386. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk perkara yang terakhir sesi ini Perkara Nomor 27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan, siapa yang menyampaikan?

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADEN ELANG YAYAN MULYANA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Izinkanlah kami untuk membacakan Permohonan. Kami dari Partai Kebangkitan Bangsa akan membacakan untuk perkara pada Dapil Banten VI. Kami untuk mempersingkat waktu, Yang Mulia karena (...)

388. KETUA: ASWANTO

Ya.

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADEN ELANG YAYAN MULYANA

Sedikit juga Permohonan yang sudah kita buat. Untuk langsung pada pokok Permohonan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi di beberapa daerah pemilihan ada sebagai berikut.

Dalam persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi. Dalam ... di Kecamatan Karang Tengah dalam versi Pemohon di PKB itu dapat 9 suara. Menurut Termohon=17, dengan selisih 8. Partai Amanat Nasional 439 versi Termohon, versi Pemohon 172, jadi selisihnya 267.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalil sebagai berikut ... mendalilkan sebagai berikut. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara, Pemohon di Kecamatan Karang Tengah sebanyak 8 suara dikarenakan selisih suara di C-1 DPD provinsi dengan dari DAA Karang Tengah dimana suara Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dikurangi. Kemudian, terjadi penambahan suara di Partai Amanat Nasional sebanyak 267 suara, disebabkan selisih suara di C-1 DPD provinsi dengan DAA Karang Tengah, dimana suara Partai Amanat Nasional pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ditambahkan bukti

bahwa pengurangan tersebut terjadi di TPS 25 dan TPS 4. Kemudian, penambahan tersebut di atas, terjadi di TPS 41. Sebagai bukti P-3 sampai P-15.

Selanjutnya, di Kecamatan Ciledug, Partai PKB dari versi Pemohon dapat 10, Termohon=8, dengan selisih 2.

Partai Amanat Nasional=42 versi Termohon. Versi Pemohon=16, selisihnya jadi 26. Bahwa ada indikasi terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Ciledug sebanyak 2 suara. Dikarenakan selisih suara di C-1 provinsi dengan DA-1 dimana suara Pemohon pada saat rekapitulasi suara di kecamatan ini dikurangi, kemudian terjadi penambahan suara di Partai Amanat Nasional sebanyak 26 suara, disebabkan selisih suara di C-1 DPD provinsi dengan DA-1 Ciledug dimana suara Partai Amanat Nasional pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan ditambahkan. Bahwa pengurangan tersebut terjadi di TPS 22 dan TPS 3, sebagaimana Bukti P-6 sampai P-22.

Selanjutnya, di Kecamatan Larangan, Partai PKB, menurut versi Pemohon mendapatkan 60 suara. Termohon dalam versi permohonan ... Termohon=41, selisih 19.

Partai Amanat, dalam versi Termohon=38, versi Pemohon=0, selisih 38. Bahwa selanjutnya pengurangan perolehan suara hampir sama sebagaimana bukti di TPS 23 dalam Bukti P-18 dan P-24.

Selanjutnya. Bahwa adapun di TPS-TPS lain di Kecamatan Karang Tengah, Ciledug, dan Larangan, termasuk Kecamatan Pinang, Cipondoh, juga terjadi kecurangan berupa pengurangan suara Pemohon, tetapi belum bisa kami buktikan sepenuhnya karena akibat Pemohon tidak memiliki data berupa DA-1 dan C-1 DPRD untuk disandingkan.

Selanjutnya. Bahwa walaupun kecurangan yang mampu diperlihatkan oleh Pemohon hanyalah sedikit, akan tetapi Pemohon sangat berharap, Yang Mulia Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi dapat memberitahukan kepada KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang di Dapil Banten VI di seluruh kecamatan. Akibatnya banyaknya kesalahan atau perbedaan perhitungan pada C-1 DPR provinsi dengan DAA-1 di semua kecamatan.

Selanjutnya. Bahwa karena ketidakmampuan Pemohon untuk membiayai saksi untuk puluhan ribu TPS di Dapil Banten VI, maka sesungguhnya Pemohon sangat berharap Yang Mulia Majelis Hakim dapat memerintahkan diadakannya rekapitulasi ulang hasil pemilihan Anggota DPRD provinsi Dapil Banten VI di semua kecamatan untuk memenuhi rasa keadilan Pemohon dan masyarakat yang telah memilih Pemohon pada Pemilu 2019 ini.

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana nomor tersebut.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang di semua tingkat kecamatan di ban ... Dapil Banten VI.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Pemohon, Raden Elang Yayan Mulyana. Dua, Trio Alberto, S.H. Tiga, Nasrullah, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati.

390. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.
Ada komentar, Prof?

391. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu, ada beberapa, ya, poin 7, poin 8, poin 9, di halaman 9 itu sebelum petitum. Bisa dijelaskan, ndak apa maksudnya itu?

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADEN ELANG YAYAN MULYANA

Jadi, ini ada beberapa ... belum bisa kita buktikan sepenuhnya, ada beberapa indikasi dari keterangan (...)

393. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, ada indikasi (...)

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADEN ELANG YAYAN MULYANA

Ya.

395. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Belum bisa dibuktikan sepenuhnya.

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADEN ELANG YAYAN MULYANA

Ya. Tapi kami sampaikan, Yang Mulia.

397. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi walaupun buktinya baru indikasi, buktinya tidak ... tidak banyak, kan (...)

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADEN ELANG YAYAN MULYANA

Ya (...)

399. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena ini disebut ini sedikit. Tapi tetap minta Mahkamah untuk (...)

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADEN ELANG YAYAN MULYANA

Ya (...)

401. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang, begitu?

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADEN ELANG YAYAN MULYANA

Ya. ada beberapa sim ... data bukti yang sudah ada, bukti surat, cuma kebetulan, Prinsipal Pemohon langsung meminta waktu ... tenggang waktu untuk mengumpulkan bukti selanjutnya, Yang Mulia.

Tapi sehari ... hari ini juga kami belum menunggu hasil bukti tersebut, gitu.

403. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. oke, jadi ... apa namanya ... ini kalau ... kalau ... kalau begini, begini bisa disuruh perintah ulang semuanya ini pemungutan suaranya ini.

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADEN ELANG YAYAN MULYANA

Siap, Yang Mulia.

405. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi ini kan ... apa namanya ... kalau yang angka-angka itu sudah ada buktinya, ya?

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADEN ELANG YAYAN MULYANA

Ada, Yang Mulia.

407. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada yang bukti.

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADEN ELANG YAYAN MULYANA

Kita sudah siapkan.

409. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Oke, terima kasih, Pak.

410. KETUA: ASWANTO

Oke. Yang Mulia ada? Baik, sekarang kita sahkan bukti dulu, ya. Pertama untuk Demokrat. Ini Provinsi Banten DPR RI Banten I Saudara memasukkan bukti P-1 sampai P-286. Betul, ya? Mana Demokrat? Betul, ya?

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EWI

Ya, Yang Mulia.

412. KETUA: ASWANTO

Ada catatan P-225 belum dileges. Kemudian, P-230 dan P-278 ini belum ada bukti fisik. Di daftar bukti sudah ada, tetapi bukti fisik belum ada. Betul, ya?

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EWI

Betul, Yang Mulia.

414. KETUA: ASWANTO

Jadi, kita sahkan P-1 sampai P-286, kecuali P-225, P-230, dan P-278.

KETUK PALU 1X

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EWI

Terima kasih, Yang Mulia.

416. KETUA: ASWANTO

Ya. Kemudian untuk PDIP ... PDIP DPRD Kota Tangsel I itu P-1 sampai dengan P-28. Betul, ya? Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Nasdem ... untuk Nasdem P-1 Nasdem sampai P-3 Nasdem, ya. Betul, ya? Kemudian P-1 Nasdem Banten I RI sampai dengan P-12 Nasdem Banten I RI. Ini kami baca sesuai dengan kode yang Anda berikan.

Kemudian, P-1 Nasdem Banten III RI sampai dengan P-3347 nasde ... Nasdem Banten III RI. Betul ya? Kemudian, P-1 Nasdem Kota Tangerang Selatan ... Tangsel V, ya? Tangerang Selatan V sampai dengan P-121 Nasdem Kota Tangsel V. Betul, ya?

Ada catatan untuk P-32 Nasdem Banten III RI ini baru ada di daftar bukti, tetapi bukti fisik belum ada. Saya ulangi lagi, untuk PPP Banten III itu belum ada alat bukti fisik.

Kemudian, P-154 sampai dengan P-156 Nasdem Banten III RI itu dicabut. Betul, ya? Kemudian, P-745, P-91, P-957, P-1437, P-1453, P-1562, P-1571 ... eh sori ... P-1562, P-1571, P-1605, P-1665, P-1680, P-1689, P-1690, P-1789, P-1792, P-3222, P-3236 Nasdem Banten III RI ini alat bukti tidak tercantum. Ini tidak ... tidak jelas alat buktinya. Nanti komunikasi kembali dengan bagian Kepaniteraan, ya.

Kemudian, P-69 Nasdem Kota Tangsel V ini daftar alat bukti dan bukti fisik tidak sesuai. Nanti disinkronkan kembali di ... kecuali yang catatan ... ada catatan tadi itu kita sahkan.

KETUK PALU 3X [sic!]

Kemudian untuk pemberitahuan penundaan sidang. Sidang berikutnya kita laksanakan insya Allah hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, waktu pukul 08.00 Indonesia ... Waktu Indonesia Barat, ya. Agendanya adalah mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, dan pengesahan bukti Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi dan Mahkamah tidak akan menyampaikan panggilan tertulis lagi untuk sidang tanggal 16 Juli itu.

Kita tidak terima lagi protes kalau ada yang protes bahwa saya tidak mendapat panggilan karena penyampaian ini sekaligus sebagai panggilan resmi. Kami tidak memanggil lagi.

Kemudian, perbaikan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu diajukan paling lambat Jumat, 12 Juli 2019, pukul 12.00 WIB. Jelas, ya? Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15:24 WIB

Jakarta, 10 Juli 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.